

Jurnal Paradigma Multidisipliner (JPM)

Strategi Pelaksanaan Inovasi Daerah Dalam Mendorong Upaya Tata Kelola Pemerintahan Di Kota Magelang

Clara Taly Puspha ¹, Lucia Rita Indrawati²

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Tidar
clarapuspha2304@gmail.com

Abstrak

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 mengamanatkan bahwa setiap daerah wajib melaksanakan inovasi daerah dalam bentuk tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan urusan kewenangan lainnya. Sementara itu, upaya pembangunan daerah dewasa ini salah satu cara percepatannya ditunjukkan dengan inovasi daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses tata kelola pemerintahan yang berbasis inovasi daerah dan menganalisis strategi inovasi daerah dalam mendorong tata kelola pemerintahan di Kota Magelang. Metode penelitian secara kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan inovasi daerah di bidang tata kelola pemerintahan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Hasilnya tata kelola pemerintahan yang berbasis inovasi daerah di Kota Magelang masih harus ditingkatkan lagi.

Kata Kunci : Daerah, Inovasi, Kota Magelang, Tata Kelola Pemerintahan

Abstract

Government regulation number 38 year 2017 mandates that each region is obliged to carry out regional innovation in the form of good governance, public service and the affairs of the authority other. Meanwhile, the efforts of the regional development nowadays, one of the ways of acceleration shown by the regional innovation. The purpose of this study is to know the process of good governance regional innovation and analyze the strategies of regional innovation in promoting good governance in the city of magelang. Qualitative method research is used to describe innovations in the field of local governance since the year of 2017 to 2019. The result is good governance regional innovation in the city of magelang is still to be improved.

Keywords : Regional, Innovation, Magelang City, Good Governance

PENDAHULUAN

Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Inovasi Daerah memiliki sasaran yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Sejalan dengan itu, usulan Inovasi Daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan Inovasi Daerah (Arifin & Sakti, 2017).

Inovasi Daerah dapat berbentuk dalam beberapa inovasi yaitu berupa Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, Inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah merupakan sebuah inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintah Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen serta pengelolaan unsur manajemen juga dibahas dalam inovasi ini.

Majunya suatu daerah sangat ditentukan oleh inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah tersebut (Setiawan, 2017).

Tata Kelola Pemerintahan pada dasarnya merupakan yang berkaitan dengan tindakan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, dan/ atau mempengaruhi urusan publik dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ke dalam kehidupan sehari-hari.

Pelaksanaan Inovasi Daerah dapat diselenggarakan berdasarkan beberapa prinsip. Disini akan dijabarkan sebanyak 8

prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Inovasi Daerah, yaitu Prinsip Peningkatan Efisiensi, yaitu Inovasi Daerah yang dilakukan harus seminimal mungkin menggunakan sumber daya dalam pelaksanaan Inovasi Daerah. Prinsip Perbaikan efektivitas, berkaitan dengan seberapa jauh tujuan Inovasi Daerah tercapai sesuai target. Prinsip Perbaikan Kualitas Pelayanan, Inovasi Daerah harus dapat memenuhi harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang murah, mudah dan cepat. Prinsip Tidak Menimbulkan Konflik Kepentingan, didalam inovasi daerah isiator tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain. Berorientasi kepada kepentingan umum, Inovasi Daerah diarahkan untuk kepentingan bangsa dan negara, kepentingan bersama rakyat dengan memperhatikan asas pembangunan nasional serta tidak diskriminatif terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antargolongan, dan gender. Prinsip Dilakukan Secara Terbuka, Inovasi Daerah yang dilaksanakan dapat diakses oleh seluruh masyarakat baik yang ada di pemerintah daerah yang bersangkutan maupun pemerintah daerah lain. Prinsip Memenuhi Nilai Kepatutan, Inovasi Daerah yang dilaksanakan tidak bertentangan dengan etika dan kebiasaan atau adat istiadat daerah setempat. Prinsip Dapat Dipertanggungjawabkan Hasilnya Tidak Untuk Kepentingan Diri Sendiri, hasil dari Inovasi Daerah tersebut dapat diukur dan dibuktikan manfaatnya bagi masyarakat.

Sejalan dengan inovasi tersebut, banyak faktor-faktor penghambat inovasi diantaranya yaitu: a) Pemimpin atau pihak-pihak yang menolak menghentikan program; b) Sangat tergantung kepada high performers bahkan top leader sebagai sumber inovasi; c) Walaupun teknologi tersedia, tetapi struktur organisasi dan budaya kerja, serta proses birokrasi yang berbelit-belit

menghambat berkembangnya inovasi; d) Tidak ada rewards atau insentif untuk melakukan inovasi atau untuk mengadopsi inovasi; e) Lemah dalam kecakapan (skills) untuk mengelola resiko atau mengelola perubahan; f) Alokasi anggaran yang terbatas dalam sistem perencanaan jangka pendek; g) Tuntutan penyelenggaraan pelayanan publik vs beban tugas administratif; dan h) Budaya 'cari aman', status quo, dan takut mengambil resiko dalam birokrasi masih terlalu kuat (Asrori & Kartika, 2018).

Kota Magelang merupakan salah satu kota yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Kota Magelang mempunyai posisi yang sangat strategis, berada dalam jalur utama penghubung Kota Semarang dengan Kota Yogyakarta. Kota Magelang terdiri dari 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Magelang Utara, Kecamatan Magelang Selatan, serta Kecamatan Magelang Tengah dengan total jumlah kelurahan yang berada di Kota Magelang sebanyak 17 (tujuh belas) kelurahan.

Pengembangan Inovasi Daerah di Kota Magelang melibatkan keterlibatan masyarakat setempat dan Organisasi Perangkat Daerah. Fungsi kelembagaan penelitian dan pengembangan sangat penting dalam mengawal lahirnya inovasi di Kota Magelang.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang menjadi satu-satunya badan litbang di Provinsi Jawa Tengah yang mampu mengawal dan mendampingi inovasi Kota Magelang.

Balitbang Kota Magelang terus berusaha memfasilitasi pengembangan Inovasi Daerah yang terdapat di Kota Magelang baik inovasi dari masyarakat maupun dari Organisasi Perangkat Daerah.

Salah satu cara yang dilakukan Kantor Balitbang Kota Magelang adalah menyelenggarakan lomba Krenova (Kreativitas dan Inovasi). Lomba ini tidak

hanya ditujukan bagi masyarakat Kota Magelang saja. Balitbang Kota Magelang menyelenggarakan lomba Krenova (Kreativitas dan Inovasi) khusus untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) se-Kota Magelang.

LANDASAN TEORI

Inovasi Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menyebutkan bahwa Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, Inovasi Daerah memiliki sebuah tujuan yaitu untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Tata Kelola Pemerintahan

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, pada pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintah Daerah yang meliputi laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.

METODE PENELITIAN

Berisi jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, target/sasaran, subjek penelitian, prosedur, instrumen dan teknik analisis data serta hal-hal lain yang berkaitan dengan cara penelitiannya. target/sasaran, subjek penelitian, prosedur, data dan instrumen, dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data serta hal-hal lain yang berkaitan dengan cara penelitiannya dapat ditulis dalam sub-subbab, dengan sub-subheading. Sub-subjudul tidak perlu diberi notasi, namun ditulis dengan huruf kecil

berawalkan huruf kapital, Constantia-11 bold, rata kiri. Sebagai contoh dapat dilihat berikut.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kota Magelang. Metode kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat tentang Inovasi Daerah di Bidang Tata Kelola Pemerintahan dari tahun 2017 hingga tahun 2019.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder. Data ini diperoleh dari Balitbang Kota Magelang.

Metode Penelitian terdiri dari Rancangan Penelitian, Subjek penelitian, identifikasi variabel dan Instrumen Penelitian, dan Prosedur & Analisa Data. Paparan metode ditulis dengan jelas agar dapat dipahami oleh pembaca.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Kota Magelang memiliki komitmen yang kuat dalam menumbuhkembangkan inovasi sebagai salah satu alat untuk mencapai visi Kota Magelang 2016-2021. Komitmen tersebut diawali dengan pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Magelang sejak tahun 2017 yang mana sebelumnya berbentuk Kantor Penelitian Pengembangan (Litbang) dan Statistik sejak tahun 2008.

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2019 tentang Lembaga Administrasi Negara (LAN) memberikan mandat untuk menyelenggarakan fungsi pengembangan inovasi administrasi negara di bidang tata pemerintahan, pelayanan publik serta kelembagaan dan sumber daya aparatur yang mampu bersaing, menghasilkan ide-ide inovasi untuk mewujudkan Tata Kelola

Pemerintahan yang lebih baik (Good Governance).

Strategi yang dilakukan oleh Kota Magelang dalam mendorong upaya Tata Kelola Pemerintahan yang baik yaitu dengan melakukan penerapan Inovasi Daerah.

Kota Magelang melalui Balitbang menyelenggarakan lomba Kreativitas dan Inovasi (Krenova) sebagai wadah bagi masyarakat untuk berinovasi. Krenova masyarakat yang diikuti oleh masyarakat Kota Magelang telah lama diselenggarakan.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa setiap daerah wajib melaksanakan inovasi daerah dalam bentuk tata kelola pemerintahan, pelayanan publik dan urusan kewenangan lainnya. Maka pada tahun 2017 untuk pertama kalinya diselenggarakan lomba Kreativitas dan Inovasi (Krenova) yang dikhususkan untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milk Daerah (BUMD). Ajang ini bahkan diklaim menjadi satu-satunya yang ada di Jawa Tengah bahkan di Indonesia.

Lomba Kreativitas dan Inovasi (Krenova) OPD dan BUMD ini di khususkan untuk peserta dari OPD dan BUMD di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

Pada tahun pertama pertama diadakan Lomba Kreativitas dan Inovasi (Krenova) OPD dan BUMD terlihat antusias peserta yang cukup besar. Dari informasi yang didapat jumlah karya yang masuk pada tahun 2017 sebanyak 26 karya kategori Tata Kelola Pemerintahan, 22 karya Pelayanan Publik, dan 5 karya urusan lain.

Setelah sebanyak 53 karya tersebut masuk, selanjutnya dilakukan tahap seleksi administrasi. Pada tahap seleksi administrasi ini terjaring sebanyak 21 karya yang berhasil lolos seleksi. Setelah itu dilakukan seleksi

substansi, pada tahap seleksi ini terjaring sebanyak 11 karya.

Kriteria yang dinyatakan lolos pada tahap seleksi substansi terdiri dari orisinalitas karya yang didaftarkan, penerapan di masyarakat, manfaat yang diperoleh dalam karya tersebut serta keberlanjutan karya.

Sebanyak 11 karya inovasi OPD dan BUMD yang lolos tahap seleksi administrasi dan seleksi substansi selanjutnya mengikuti tahap penilaian. Namun yang mengikuti penilaian hanya 10 karya, hal ini dikarenakan terdapat satu karya yang mengundurkan diri. Hasil-hasil karya tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Karya Inovasi OPD dan BUMD Tahun 2017

No	Judul Inovasi	OPD Pengusul
1	SIPPUT	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
2	Aplikasi Pajak	BPKAD
3	Pak Waris	Dinas Kepend dan Pencapilan
4	2in1 Hybrid Composter	Dinas Pertanian dan Pangan (Disperpa)
5	ATCS Sound	Dinas Perhubungan
6	Shift Hemodialisa	RSUD Tidar
7	Kampung Organik	Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
8	Cek KIR Online	Dinas Perhubungan
9	Ticketing Online	PDOW Taman Kyai Langgeng
10	Mesin Pencacah Washer	RSUD Tidar

Sumber : Datago dan BALITBANG

Sebanyak 10 karya tersebut berasal dari 7 instansi, antara lain Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pertanian dan Pangan (Disperpa), Dinas Perhubungan (Dishub), RSUD Tidar dan Taman Kyai Langgeng.

Dapat dilihat bahwa terdapat beberapa instansi yang mengirimkan lebih dari satu karya inovasi. Instansi tersebut antara lain Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perhubungan (Dishub) serta RSUD Tidar yang mana dari masing-masing instansi tersebut mengirimkan sebanyak 2 karya inovasi.

Kemudian pada tahun 2018 Kantor Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kota Magelang kembali menyelenggarakan Lomba Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA) khusus untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) se-Kota Magelang.

Terdapat 11 OPD yang mendaftar dengan total inovasi sebanyak 24 inovasi. Dari sebanyak 24 inovasi terdiri dari 17 inovasi Pelayanan Publik, 5 Tata Kelola Pemerintahan, dan 2 inovasi mengenai urusan kewenangan pemerintahan yang lain.

Seperti tahun sebelumnya setelah karya tersebut masuk selanjutnya dilakukan seleksi administrasi yang kemudian dilakukan seleksi substansi. Sehingga pada tahun 2018 terdapat sebanyak 17 karya inovasi yang mengikuti tahap penilaian. Karya-karya inovasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2 Inovasi OPD Tahun 2018

No	Judul Inovasi	OPD Pengusul
1	SIG.Magelangkota.go.id	Dinas PUPR
2	Model Pelatihan	Lab Kesehatan
3	HCC	Puskesmas

		MGL Utara	dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) se-		
4	Sipitung	Puskesmas	Kota Magelang.		
		MGL Utara	Pada tahun 2019 ini total karya		
5	Gemakapitasi	Puskesmas	inovasi yang sampai pada tahap penilaian		
		MGL Utara	sebanyak 18 karya inovasi. Karya-karya		
6	PakDewo	BPKAD	inovasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 3		
7	NRW	PDAM	sebagai berikut.		
8	Takelitung	PDAM	Tabel 3 Inovasi OPD Tahun 2019		
9	Apl Ukur Air	PDAM			
10	Balibung	Bapermas	No	Judul Inovasi	OPD Pengusul
11	Gepura	Bapermas	1	Magelang Cerdas	Diskominsta
12	ORTU	SMP N 11	2	Si Retro	BPKAD
13	Datago	Diskominsta	3	Adinda	Dinas
14	Takelabkes	Lab Keswan			Perhubungan
15	Takelabkes	Lab	4	Asi Umi Resti	Dinas
		Kesehatan			Kesehatan
16	Dokadu	Dukcapil	5	ATCS 119 (Tutulan)	Dinas
17	Aplikasi Bee Smart	SMP N 11			Perhubungan
Sumber : Datago dan BALITBANG			6	Bakul Pasar	BPKAD
			7	Investigasi Posisi	Dinas
				Strategis Damkar	Pendidikan
				STEM	
			8	SMART (Supervising	Dinas
				of Malnutrision Risk	Kesehatan
				Based Team)	
			9	Animasi NOPI	Dinas
					Kesehatan
			10	Detak Insting	Dinas
					Kesehatan
			11	Pelayanan IMB	DPUPR
				Ekspres	
			12	MES Dalam	Dinas
				Mendukung Program	Kesehatan
				Prioritas	
			13	Membangun Keluarga	Dinas
				Tangguh menuju Zero	Kesehatan
				AKI-AKB	
			14	Kader Petisi	Dinas
					Kesehatan
			15	Simbahku Dolan	Dinas
					Kesehatan
			16	Simpul Bumil	Dinas
					Kesehatan

17	Cepet ah Mateng	Dinas Kesehatan
18	ATLM Posbindu PTM Garda PTM	Dinas Kesehatan

Sumber : Datago dan BALITBANG

Beberapa instansi yang berhasil mencapai tahap penilaian antara lain Diskominsta, BPKAD, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, DPUPR. Pada lomba tahun 2019 ini didominasi oleh Dinas Kesehatan yang sampai tahap penilaian mampu mengirimkan sebanyak 11 karya inovasi.

Dari ketiga tabel yang telah disajikan dapat dilihat bahwa dari tahun pertama diadakannya Lomba Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA) khusus untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) se-Kota Magelang jumlah peserta dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Begitu pula dengan karya inovasi yang mampu mencapai pada tahap penilaian juga mengalami kenaikan.

Namun terlihat juga bahwa pada setiap tahunnya karya inovasi tersebut didominasi oleh beberapa instansi saja. Selain itu, karya-karya inovasi yang didaftarkan juga kebanyakan termasuk dalam kriteria inovasi Pelayanan Publik. Hanya beberapa instansi saja yang mampu membuat karya Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah, padahal Tata Kelola Pemerintahan Daerah sangat diperlukan agar seluruh pihak di tempat kerja mampu mengembangkan keterampilan yang dapat mempermudah dalam melakukan setiap pekerjaannya.

Pemerintah sangat mengapresiasi strategi pelaksanaan inovasi daerah tersebut. Dengan adanya Lomba Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA) khusus untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) se-Kota

Magelang tersebut diharapkan dapat memotivasi peserta terutama pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) se-Kota Magelang untuk terus meningkatkan inovasi dan kreasinya terutama pada Tata Kelola Pemerintahannya.

Membentuk pemerintahan yang inovatif belum bisa optimal apabila tingkat kesadaran untuk selalu berinovasi masih rendah, padahal inovasi sangat penting untuk dilakukan pada setiap lapisan pemerintahan demi tercapainya pemerintahan yang "*good governance*".

SIMPULAN

Dari hasil penelitian diketahui bahwa adanya Inovasi Daerah sangatlah diperlukan baik inovasi dari masyarakat maupun dari Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini dikarenakan upaya pembangunan daerah dewasa ini salah satu cara percepatannya ditunjukkan dengan Inovasi Daerah. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan digunakan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, profesionalisme aparatur serta perluasan partisipasi publik.

Dengan adanya Lomba Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA) khusus untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) se-Kota Magelang diharapkan dapat memotivasi untuk terus meningkatkan inovasi dan kreasinya dari tahun ke tahun. Inovasi Daerah di bidang Tata Kelola Pemerintahan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 lebih sedikit daripada Inovasi Daerah di bidang Pelayanan Publik. Sehingga Tata Kelola Pemerintahan yang berbasis Inovasi Daerah di Kota Magelang masih harus ditingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- https://doi.org/10.32630/sukowati.v2i1.49
- Afifah, Y. N. (2019). TINJAUAN TEORI PERENCANAAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMANFAATAN DANA DESA. *JURNAL LITBANG SUKOWATI*, 3(1), 51-60.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Andhika, L. R. (2020). Kajian Literatur: Studi Pemetaan Sistematis Indikator Inovasi Sektor Publik. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 3(2), 19.
<https://doi.org/10.32630/sukowati.v3i2.150>
- Arifin, M. Z., & Sakti, A. B. (2017). Peran Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang dalam Menumbuhkembangkan Inovasi Daerah. *The 6th University Research Colloquium 2017 Universitas Muhammadiyah Magelang Peran*, 1, 61-72.
- Asrori, & Kartika, R. S. (2018). Penyusunan Petunjuk Teknis Penilaian Inovative Government Award (Iga) Tahun 2017. *Inovasi*, 15(2), 65-76.
<https://doi.org/10.33626/inovasi.v15i2.53>
- Febrian, R. A. (2018). Inovasi Daerah dari Perspektif Regulasi, Konseptual, dan Empiris (Tinjauan terhadap pasal Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). *Jurnal Kajian Pemerintah*, IV(1), 44-55.
- Graha, I. M. S. (2021). *Proses Kota Denpasar Menuju Smart City*. 4(2), 1-11.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
- Safitri, T. A., & Fathah, R. N. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 2(1), 89-105.
- Setiawan, I. (2017). Implementasi Inovasi Daerah Di Kota Balikpapan. *Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 2(2), 83-97.
- Suhendra, A. (2018). Inovasi Daerah dalam Reformasi Pemerintahan Kota Tangerang Selatan dan Kota Magelang. *Matra Pembaruan*, 2(1), 39-48.
<https://doi.org/10.21787/mp.2.1.2018.39-48>
- Suprianto, E. (2014). Pengaruh Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Skpd) Guna Mendukung Implementasi Otonomi Daerah. *EKOBIS*, 15(1), 17-30.
Retrieved from <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ekobis/article/viewFile/552/454>
- Tahir, M. M. (2016). Inovasi Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Program Smart Card di Kota Makassar. *Prosiding Seminar Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom*, (December 2015), 278-299.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi